

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Atep Adya Barata, 2003, BPHTB Menghitung Obyek dan cara Mengajukan Keberatan Pajak, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Bambang Sugugono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 1999, Karya Unipress, Jakarta.

Djoko Muljono, 2010, Panduan Brevet Pajak-PPN, PPn.BM, Bea Materai, PBB, BPHTB, Andi Offset, Yogyakarta.

Effendi Perangin-angin, 1986, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Ismaya, Samun, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta.

K. Wantjik Saleh, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marihot P. Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

Publishing, 2010, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hak-Hak Atas Tanah, penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Sahnan, 2018, Hukum Agraria Indonesia, penerbit Setara Press, Malang.

Salim, H.S., 2016, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Urip, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, 2018, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.

Zumrokhatun dan Dandi Syahrizal, 2014, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, penerbit Dunia Cerdas, Jakarta

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak